

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M., & Li, M. (2015). *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. Notarius, 8(2).
- Farina, T. (2014). *Asas Kecermatan Dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Brawijaya.
- Kristiyanti, L. M. S. (2014). *Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 14(02).
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- Mamik, M. (2014). *Metodologi Kualitatif*. In Zifatama PUBLISHER. Zifatama Publisher.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3–4.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (1983). Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Rahamaningsih, A. A. (2023). *Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*. JATIJAJAR LAW REVIEW, 2(1).
- Rumokoy, N. K. (2010). *Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*. Jurnal Hukum Unsrat, 18(3), 86–95.
- Solechan. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Administrative Law & Government Journal, 2(3), 1–17. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>
- Sumeleh, E. J. B. (2017). *Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Lex Administratum, 5(9).
- Susanto, H. (2006). *Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora, 2(1), 1–97.